



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 916/III/VII/2016



**Ketua DPR RI Dorong
Diberlakukannya Merit Sistem**

**Ketua DPR RI Dorong Terminal 3
Ultimate Segera Dioperasikan**

**DPR RI Hadiri Peluncuran World
e-Parliament Report 2016**

GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Suasana acara halalbihalal Setjen DPR RI yang juga dihadiri Pimpinan DPR RI

Ketua DPR RI Dorong Diberlakukannya Merit Sistem

Ketua DPR RI Ade Komarudin mendorong agar lembaga DPR RI dibangun berdasarkan kinerja dan profesionalitas atau disebutnya sebagai merit sistem. Hal itu disampaikan saat menghadiri halalbihalal dengan seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI di Lobby Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (13/7).

Dorongan itu seiring dengan Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. "Ibu Win sebentar lagi akan pensiun, kami atas nama Pimpinan Dewan tentu terima kasih karena terus memberikan bimbingan kepada tim kesetjanaan. Karena itu saya titip agar merit sistem diberlakukan di DPR RI," ujar Akom, sapaan akrab Ade Komarudin.

Merit sistem yang dimaksud adalah penghargaan terhadap prestasi yang dicapai oleh pegawai yang melakukan kerja keras. "Kita tak usah mengenal

lagi prestasi berdasarkan umur dan senioritas, tapi prestasi dan jabatan yang disandang berdasarkan prestasi yang telah dilakukan," paparnya.

Akom menegaskan bahwa jabatan itu adalah hak bagi pegawai yang telah melakukan kerja keras, bukan seseorang yang lebih senior atau memasuki pensiun. "Seseorang berhak atas jabatan itu bukan berdasarkan umur atau yang akan memasuki pensiun, atau senior, tetapi berdasarkan prestasi dan kinerja yang patut diberikan reward oleh kita," tegas Akom.

Politisi Golkar itu menegaskan bahwa merit sistem itu penting

diberlakukan untuk kebaikan semua dan pegawai yang bekerja di Setjen DPR RI bisa lebih termotivasi. "Merit sitem itu untuk kebaikan kita semua agar yang bekerja disini bisa lebih termotivasi," paparnya.

Dalam halalbihalal tersebut, Akom juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh jajaran Pejabat Setjen DPR RI, staf serta mitra kerja jika selama bertugas di DPR RI ada hal yang kurang berkenan. "Saya atas nama Pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf besar-besarnya. Maklum sebagai manusia biasa pasti tak pernah luput dari kesalahan," pungkasnya. ■

Halalbihalal

Momen Tingkatkan Solidaritas dan Integritas

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mengatakan acara halalbihalal digelar setiap tahun dimaksudkan untuk memperkuat tali silaturahmi tidak hanya antar karyawan Setjen DPR RI tetapi juga para karyawan yang mendukung kegiatan Dewan seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI, Polda Metro Jaya serta karyawan PT Pos dan para wartawan Koordinatoriat DPR RI.

Hadir dalam acara yang digelar di Loby Gedung Nusantara Rabu (13/7) ini Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Johnson Rajagukguk serta tiga mantan Sekjen DPR RI Ny. Sumaryati Haryanto, Nining Indra Saleh dan Faisal Djamal serta Pengurus Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) DPR RI.

"Halalbihalal dilakukan setelah sebulan

penuh melakukan ibadah puasa Ramadan. Karena itu forum halalbihalal ini merupakan momen untuk meningkatkan solidaritas dan integritas karyawan/karyawati dalam rangka mendukung kegiatan Dewan serta meminta maaf sebab dalam kerja sama banyak hal yang kurang berkenan atau kesalahan," ungkap Win- panggilan akrab Sekjen DPR RI.

Di awal sambutannya, Sekjen DPR RI mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah kepada seluruh pegawai dan hadirin. "Taqabbalallahu Minna wa Minkum, semoga Allah Swt menerima



Suasana Halalbihalal Pimpinan DPR RI dengan Karyawan Setjen DPR RI di Lobi Gedung Nusantara

amal ibadah kita sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih bersyukur dan kembali kepada fitrah secara lahir dan batin," ujarnya.

Acara halalbihalal menurutnya didasari oleh bentuk religiusitas dan bentuk syukur setelah melewati bulan Ramadhan. Halal bi halal ini didasari dari religiusitas yang tinggi setelah melakukan ibadah puasa selama satu bulan hingga tiba Hari Raya Idul Fitri sebagai tanda syukur dan penuh ketakwaan serta ridho Allah setelah bulan Ramadhan.

Diungkapkan pula, kegiatan halalbihalal di lingkungan Setjen DPR RI

diselenggarakan secara rutin tiap tahunnya, hal itu ditegaskan dengan maksud menjaga silaturahmi dan ukhuwah islamiyah yang lebih akrab dengan jajaran pegawai. "Halalbihalal memang tiap tahun kami selenggarakan, dengan maksud menjaga silaturahmi dan mempererat ukhuwah islamiyah dengan tergalangnya persaudaraan yang lebih akrab," sambungnya.

Selain diisi sambutan Ketua DPR RI, acara halalbihalal ini diisi Tauziah oleh Ustadz Dadang Holiyulloh yang mengupas masalah halalbihalal. Halalbihalal ini adalah produk asli Indonesia, di Arab sendiri halalbihalal tidak ada. Kisahnya KH Wahab Abdulloh pada tahun 1948 dipanggil oleh Presiden Soekarno karena setelah 3 tahun kemerdekaan RI disinyalir terjadi disintegrasi bangsa. "Beliau diundang Presiden bagaimana mengupayakan persatuan bangsa, sehingga muncul istilah halalbihalal-saling menghalalkan," ia menambahkan. ■

(b.smp) foto: jakarta.rtv



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djujiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE, M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murchiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

[ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

DPR RI Tegaskan Kemacetan Horor Brexit Jangan Sampai Terulang

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan agar kemacetan parah yang terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur atau Brebes Exit (Brexit) agar tidak terulang lagi. Ia menilai peristiwa yang menelan korban jiwa 17 orang tersebut akibat strategi dan perencanaan yang kurang matang dalam mengantisipasi kemacetan.

“Kemacetan di Brebes kemarin sangat memilukan dan mencoreng muka kita semua. Bisa dibayangkan ribuan kendaraan keluar tol menuju jalan raya kecil itu tanpa pengaturan, tanpa ada yang ditutup pasti macet,” ungkap Agus Hermanto saat melakukan peninjauan arus balik lebaran 2016 di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/7).

Sementara itu, untuk mengantisipasi kemacetan para pada arus balik, politisi Fraksi Demokrat ini meminta seluruh pihak terkait agar mengubah strategi dalam melakukan rekayasa lalu lintas serta memerhatikan arus kendaraan yang masuk melalui pintu tol Brebes Timur.

“Alur lalu-lintas di tol harus diperbaiki, pejabat-pejabat pemerintah yang menangani transportasi ini juga harus betul-betul fokus



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meninjau arus balik lebaran 2016

dan serius untuk mencari jalan keluar agar kejadian seperti kemarin tidak terulang,” ujarnya.

Menurutnya, potensi kemacetan akan terjadi pada arus masuk menuju pintu tol Brexit, sementara pada arus keluar diprediksi lebih lancar.

terangnya.

“Tetapi ini harus teratur sehingga masuk di dalam tol cukup lancar dan arusnya di Jakarta, tetap dijaga. Tapi kami yakin di Jakarta dengan kondisi jalan yang lebar, bisa diatasi,” imbuh politisi dapil Jawa Tengah I ini. ■

(anamp) fotanme/mr



Ketua DPR RI Ade Komarudin dan sejumlah Anggota DPR RI meninjau Terminal 3 Ultimate Bandara Soetta

Ketua DPR RI Dorong Terminal 3 Ultimate Segera Dioperasikan

Ketua DPR RI Ade Komarudin mendorong Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta agar segera dioperasikan. Disampainya, Terminal 3 Ultimate sudah bisa dioperasikan dan hanya tinggal menunggu tahap finishing infrastruktur Air Traffic Control (ATC). Pihak Angkasa Pura II pun berencana menyelesaikannya dalam waktu dua minggu ke depan.

“Saya mendesak agar Kementerian Perhubungan untuk melakukan verifikasi sebagaimana mestinya, memanfaatkan waktu sebelum lebaran ini sehingga bisa di follow up oleh Angkasa Pura II. Kalau kita bisa cepat kenapa kita perlambat,” tegasnya saat meninjau Terminal 3 Ultimate Bandara Soetta, Cengkareng, Tangerang, Rabu (29/6).

Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, menyampaikan kekagumannya saat mengelilingi terminal yang cukup megah tersebut. “Hasilnya cukup bagus dan memuaskan walaupun belum tuntas 100 persen, tinggal perbaikan sedikit,” terang politisi F-PG itu.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga menyampaikan pesan kepada Angkasa

Pura II, agar manajemen pengelolaan dan pemeliharaan Terminal 3 Ultimate supaya lebih rapi, tertib, dan teratur seperti di negara lain.

"Karena bandara itu, seperti 'wajah' negara ini. Jadi kalau 'wajah' negara ini bagus, saya yakin kesan orang luar kepada Indonesia lebih baik. Dengan seperti itu, maka pariwisata kita juga akan terbantu mencapai target sebagaimana yang diinginkan, yakni kunjungan wisatawan semakin banyak," harap Akom.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi V Fary Djemy Francis (F-Gerindra), ia mengatakan, sebelumnya saat rapat kerja Komisi V dengan Kementerian Perhubungan, pihaknya telah mempertanyakan status Terminal 3 Ultimate ini agar segera dimanfaatkan.

"Salah satu yang masih perlu diverifikasi adalah ATC nya. Kalau sudah selesai, nanti pihak AP akan informasikan ke kami dan kita juga mendorong agar cepat diverifikasi. Jangan sampai ini ditunda dan di pending," ungkap politisi asal dapil NTT itu.

Menanggapi amanah dari DPR RI, Direktur Utama AP II Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya siap mengoperasikan Terminal 3 Ultimate setelah ATC dirampungkan. Setelah itu, AP II tinggal menunggu verifikasi dari Kementerian Perhubungan.

"Pada dasarnya semuanya siap tinggal ATC. Nah ATC ini kami butuh rekomendasi dari perhubungan dalam waktu 1-2 minggu selesai, segera dilaksanakan. Tetapi yang International

belum akan kita operasikan, baru domestik aja," ungkap Budi Karya.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan merasa terapresiasi dengan kedatangan Akom dan rombongan. Menurutnya, dengan dukungan penuh dari DPR RI, pihaknya semakin bersemangat untuk melakukan pengelolaan yang baik.

"Amanah dari Pak Ketua untuk mengelola, kami akan *all out*. Kami persembahkan ini untuk bangsa dan kita akan berkompetensi secara international," janji Budi.

Selain meninjau Terminal 3 Ultimate Bandara Soetta, sebelumnya Akom dan rombongan meninjau Terminal 1A dan Terminal 2F Bandara Soetta, dan Garuda Indonesia Sentra Operasi. ■

(amsy) Foto: Kresna, Rumi/mr

DPR RI Minta Pemerintah Keluarkan *Travel Warning* di Laut Philipina

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah segera menerbitkan *travel warning* kepada seluruh WNI yang mendekati wilayah perairan Laut Filipina. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata.

“Sangat disayangkan kejadian ini berulang hingga ke-4 kali, harusnya pemerintah memberikan suatu mapping, jika perlu diberikan suatu penanda bahwa tidak boleh melampaui koordinat tertentu di laut yang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang bisa menimbulkan penyanderaan seperti yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf,” tegas Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7).

Menurutnya, peristiwa penyanderaan terhadap tiga WNI yang baru saja terjadi merupakan suatu kegagalan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Ini menunjukkan kegagalan kita dalam mengamankan wilayah kedaulatan kita sendiri, kalau mereka mau melewati sesuatu yang dianggap berbahaya harus



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

ada *warning*, paling tidak ada *travel warning*, ada pencegahannya," ujar politisi Fraksi Gerindra ini.

Disamping itu, lanjut Fadli, jika ada WNI yang terpaksa melintasi daerah rawan tersebut, pemerintah harus tetap

melindungi setiap warga negaranya dengan memberikan pengawalan.

"Kalau mau lewat di situ harus dikawal karena tugas pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya, harus diberikan suatu upaya yang maksimal untuk pembebasan sandera," tambahnya.

Politisi dari Dapil Jawa Barat V ini mengimbau agar Pemerintah melakukan diplomasi yang lebih efektif secara bilateral maupun ASEAN terkait dengan kasus penyanderaan yang kerap terjadi maupun dalam kasus di Laut Cina Selatan.

"Masih banyak pekerjaan politik luar negeri kita yang belum maksimal di dalam melakukan suatu pengawasan serta pembelaan terhadap kepentingan nasional kita. Inisiatifnya dari eksekutif, kalau DPR RI tetap dukung upaya mengamankan wilayah kedaulatan kita," imbuah Fadli. ■

(amsy) foto: jayadi/br

Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Kuasai 40 Persen Pasar Nasional

Ketua DPR RI Ade Komarudin mendorong pemerintah agar mampu menguasai 40 persen pengelolaan pasar nasional. Dia juga mengharapkan agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat berperan melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat Pimpinan DPR RI dan MPR RI menyelenggarakan bazar daging sapi murah untuk masyarakat dan karyawan di lingkungan Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

"Bulog kita perankan kembali menjadi satu badan logistik untuk melakukan stabilisasi harga maupun pasar. Sebanyak 40 persen pasar harus dikuasai oleh perusahaan logistik nasional. Sisanya 60 persen kita serahkan swasta," ujar Akom sapaan akrab Ketua DPR RI, di Masjid Baiturrahman DPR RI, Jumat (1/7).

Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Ketua MPR Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua MPR Oesman Sapta melayani langsung penjualan daging

sapi. Bazar daging sapi murah ini menjual daging seharga Rp 75 ribu perkilo. Pembeli antusias menyambut harga



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Ketua MPR beserta Wakilnya saat acara Bazar Daging murah

daging yang di bawah pasaran ini, yang umumnya menembus harga sampai Rp 130 ribu perkilo di pasaran. Kerumunan

pembeli memadati Pimpinan DPR RI dan MPR yang melayani langsung para peminat daging. Bazar ini guna menyambut konsumsi daging untuk hari raya Lebaran.

Akom juga menyampaikan harga daging nasional berkat operasi dan intervensi pemerintah turun menjadi Rp 80 ribu perkilo dan dijual di pasar menjadi Rp 85 ribu perkilo. Sementara yang ada di pasar bebas tanpa intervensi pemerintah harganya mencapai Rp 120 ribu hingga Rp 130 ribu perkilo.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, "ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman

dengan harga yang terjangkau. Rp 75 ribu satu kilo untuk bikin rendang dan semur," paparnya. ■

(cto.mpr) foto.krema/br

Pimpinan DPR RI Tekankan Pemberantasan Terorisme dan Reformasi Polri

Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol. Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di Istana Presiden, Rabu (13/7). Pimpinan DPR RI memberikan tanggapan pada penekanan tugas Kapolri soal pemberantasan terorisme dan reformasi di tubuh Polri.

“ Yang utama yang penting menurut saya, tantangan berat bahaya laten terorisme sesuai dengan keahlian beliau,” ujar Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI Ade Komarudin di Komplek Istana Negara, sesaat setelah pelantikan Kapolri.

Terkait dengan tantangan reformasi di tubuh Polri disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Kepresidenan. "Kita berharap ada perbaikan, seperti dalam amanat presiden, melakukan reformasi di tubuh Polri," ungkap Fadli.

Selain itu dia juga mengucapkan selamat kepada Tito yang telah dilantik, dan juga mengingatkan tugas sebagai Kapolri merupakan amanah yang tidak mudah,



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersalaman dengan Jenderal Tito Karnavian usai dilantik menjadi Kapolri

karena berkaitan dengan penjagaan keamanan seluruh wilayah Indonesia. "Kita tentu ucapkan selamat kepada Pak Tito menjalankan tugas dan amanah yang berat, mengamankan seluruh wilayah Indonesia di dalam situasi sekarang," paparnya.

Terkait pemberantasan terorisme, Akom melanjutkan pesannya, bahwa pemberantasan terorisme tidak semata-mata hanya dengan pendekatan keamanan saja, tapi juga penting

memperhatikan aspek koordinasi dengan institusi yang berkaitan langsung dengan p e n a n a m a n p e m a h a m a n kewarganegaraan yang baik dan benar.

"Kita harap pemberantasan terorisme nanti dengan pendekatan koordinasi dengan instansi lain. Tidak semata-mata hanya keamanan saja. Sifatnya bukan hanya *security approach*, bisa jadi soal ideologi, pendidikan dan lain sebagainya," jelas Akom.

Di samping itu Akom juga

menyinggung soal kinerja Kapolri sebelumnya, dan menilai selama ini kinerja Jenderal Badrodin Haiti cukup bagus, dan telah mewariskan kinerja yang baik.

"Evaluasi pada kepemimpinan Polri sebelumnya. Pak Badrodin cukup bagus, beliau lulus dengan nilai yang cukup bagus. Memasuki masa pensiun dengan tenang, mewariskan kepada generasi selanjutnya kinerja yang baik selama memimpin Polri," ungkap Akom. ■

(eko.mp)/fotocam/ri/ru.

Wakil Ketua DPR RI Apresiasi Kesiapan PT KAI Tangani Arus Balik

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memberikan apresiasi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat meninjau kesiapan arus balik di Stasiun Poncol. Menurutnya, persiapan KAI khususnya di Poncol sudah cukup prima.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meninjau kesiapan PT KAI menghadapi arus balik di Stasiun Poncol Semarang

sebanyak 14 gerbong yang menuju Jakarta," ungkapnya.

Tidak hanya itu, ia juga diberikan kesempatan untuk meletakkan batu pertama bangunan UPT PT KAI Semarang di Poncol. Dikemukakannya, di tempat ini akan diberikan pelatihan - pelatihan kepada karyawan PT KAI guna meningkatkan pelayanan publik.

"Terlebih lagi sekarang dari sektor transportasi, kereta api menjadi pilar kita jadi sudah sewajibnya seluruh pelayanan publik terus ditingkatkan," paparnya.

Tak hanya itu, Agus juga mendukung sepenuhnya agar anggaran PT KAI diperkuat untuk mengatasi kurangnya jumlah kereta yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan yang ada.

"Tidak mungkin kurang kereta mau didandanin, ya harus beli, wong keretanya itu kereta lama kok. Dan beli itu juga kita meningkatkan produk dalam negeri, karena tidak di-import tetapi belinya di INKA sehingga kita bisa bersama memajukan perindustrian perkereta-apian kita," jelas Agus.

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro menuturkan persiapan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya baik dari segi kemandirian, kenyamanan ruang tunggu, mushola hingga toilet. "Saya merasa ini lebih baik, kita belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya," papar Edi.

Selain meninjau Stasiun Poncol, Agus Hermanto didampingi sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah juga meninjau Bandara International Ahmad Yani, serta Terminal Terboyo Semarang. Agus juga menyempatkan berbincang dengan sejumlah penumpang arus balik lebaran 2016. ■

(ann.mp)/fotocam/ri/ru.

“ Kita lihat bahwa pelayanan kereta api ini sudah cukup bagus tapi tidak boleh berhenti disini, tetap perlu ditingkatkan terus. Tetap harus ditingkatkan sehingga kedepan berjalan jauh lebih baik,” papar Agus Hermanto saat memeriksa kesiapan Stasiun Poncol menghadapi arus balik lebaran 2016 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/7).

Agus menilai, Stasiun Poncol yang merupakan stasiun terbesar kedua di Semarang setelah Stasiun Tawang menjadi penting. Hal ini dikarenakan Stasiun Poncol menjadi tempat pemberhentian kereta api kelas ekonomi di Semarang.

"Poncol ini sangat penting, karena disini ada kereta api ekonomi sehingga

kita harus lebih banyak memberikan keberpihakan kepada masyarakat strata sosial menengah ke bawah," jelas politisi dapil Jawa Tengah I ini.

Sisi lain, politisi Demokrat ini juga memberikan catatan khusus kepada PT KAI agar segera memperpanjang peron stasiun Poncol sehingga penumpang tidak naik dari tanah biasa lagi melainkan dari beton.

Dalam kunjungannya kali ini, Agus juga diberikan kehormatan untuk memberangkatkan kereta api ekonomi tujuan Semarang - Jakarta.

"Sungguh merupakan suatu kebanggaan saya yang sangat besar, saya bisa memberangkatkan kereta api ekonomi

Pimpinan DPR RI Terima Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc

Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Ketua Komisi Yudisial (KY) dalam rangka penyampaian usulan Calon Hakim Agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, Kamis (30/6) di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung DPR RI, Jakarta.

Rombongan KY diterima langsung oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dalam rapat Komisi Yudisial menyampaikan 5 nama calon hakim agung dan 2 hakim ad hoc yang telah melakukan seleksi sebelumnya.

Kelima calon CHA dengan komposisi 3 CHA kamar Perdata, 1 CHA kamar Militer, dan 1 CHA kamar Agama dan 2 calon hakim ad hoc Tipikor di MA. KY menyampaikan untuk meminta persetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

"Semua nama yang diusulkan Komisi Yudisial, akan diproses oleh DPR RI dengan Rapat Pimpinan terlebih dahulu kemudian rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya akan diberikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersangkutan yaitu Komisi 3," ujar Akom sapaan Ade Komarudin.

Sebelumnya, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriadi Azhari menjelaskan jumlah calon diusulkan KY ke DPR RI tersebut tidak memenuhi jumlah yang diminta MA, yaitu sebanyak 8 hakim agung (dengan komposisi 4 hakim agung kamar Perdata, 1 hakim agung kamar Pidana, 1 hakim agung kamar Agama, 1 hakim agung Militer, dan 1 hakim agung Tata Usaha Negara). Kemudian pada 3 hakim ad hoc Tipikor di MA.

Artinya KY hanya memenuhi 3



Pimpinan DPR RI menerima nama calon Hakim Agung dari Ketua KY

CHA dari 4 CHA untuk kamar perdata yang diminta MA dan 2 calon dari 3 calon hakim ad hoc Tipikor MA yang diminta. Sementara untuk kamar Pidana dan Tata Usaha Negara, KY tidak mengusulkan satu nama pun kepada DPR RI.

"Kami berupaya mencari para calon yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan MA. Kami juga memiliki standar kompetensi dalam setiap penilaian dan kelulusan para calon. Maka dari itu kami mengajukan calon sesuai dengan standar uji kelayakan yang kami lakukan," ujar Aidul.

Lebih lanjut ia menjelaskan, calon yang dinilai kurang layak tidak akan kami paksakan untuk memenuhi kuota yang diminta. Hanya calon yang layak secara kualitas dan integritas yang akan diusulkan.

"Kebijakan ini kami lakukan sebagai upaya KY dalam menjalankan amanat Undang-undang untuk menghasilkan hakim agung dan hakim ad hoc yang berkualitas dan berintegritas demi mewujudkan peradilan yang agung dan bersih," katanya.

Adapun kelima nama calon hakim agung ini ialah, Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M, H.Panji Widagdo, S.H.,M.H. dan Setyawan Hartono, S.H.,M.H (kamar Perdata). Kol. Chk.Hidayat Manao, S.H.,M.H (Kamar Militer) dan Dr.H.Edi Riadi, S.H.,M.H. (Kamar Agama)

Dan calon hakim ad hoc Tipikor ialah Dermawan S. Djamian, S.H.,M.H.,CN. dan Dr.H.Marsidin Namawi, S.H.,M.H. yang sebelumnya, para calon telah menjalani seleksi. ■

(rnm) Foto: Arzua/MR

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto Tinjau Kesiapan Bandara Ahmad Yani Jelang Arus Balik

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meninjau kesiapan sarana dan prasarana Bandara International Ahmad Yani menghadapi arus balik mudik Lebaran 2016 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/7).

“ Saat ini Angkasa Pura I sudah mempersiapkan dengan sangat baik dan cukup teratur. Walaupun dengan fasilitas cukup terbatas, namun harus melayani penumpang yang cukup tinggi sehingga pelayanan harus kita tingkatkan lagi. Infrastruktur yang ada harus kita persiapkan semaksimal mungkin,” ungkap Agus Hermanto saat melakukan peninjauan.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah

I ini juga meminta kepada Angkasa Pura I untuk meningkatkan fasilitas dan keamanan di Bandara Ahmad Yani. Menurutnya, Ahmad Yani merupakan bandara yang strategis, karena berada di Ibu Kota Provinsi.

"Diharapkan Angkasa Pura bisa mengembangkan potensi, pelayanan Bandara dituntut lebih baik karena kebutuhan sektor transportasi selalu



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berdialog dengan Direksi Angkasa Pura I

meningkat, termasuk penerbangan," tutur politisi Partai Demokrat ini.

Jumlah penumpang pesawat terbang di Semarang saat Lebaran melonjak sekitar 13 persen. Berdasarkan data tahun 2015, tercatat jumlah penumpang saat memasuki masa mudik mencapai 7.000 penumpang dalam sehari yang merupakan total jumlah penumpang kedatangan dan keberangkatan. Sedangkan pada kondisi normal, jumlah

penumpang mencapai 5.500 - 6.000.

Sementara itu, Direktur Marketing dan Pengembangan Bisnis Angkasa Pura I Moch Asrori mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipatif membludaknya jumlah penumpang saat arus mudik Lebaran dengan menambah tiga extra-flight untuk lima penerbangan dalam sehari. Extra-Flight ini berlaku sejak 24 Juni hingga 17 Juli 2016 atau selama 25 hari pelayanan pada masa arus balik dan arus mudik.

Kepada Direksi Angkasa Pura I, Agus mengutarakan dukungannya untuk mendorong percepatan pembangunan bandara baru Ahmad Yani. Menurutnya, kondisi bandara Ahmad Yani saat ini sudah tidak memadai, mengingat setiap tahunnya jumlah penumpang mengalami kenaikan.

"Tuntutan keadaan sudah tidak mungkin bisa tercover, sekarang kan penumpang naik terus, penerbangan naik terus. Kenyamanan harus kita tingkatkan, sampai saat ini kan kita belum punya *gateway*, tentunya dengan pembangunan yang baru kita siapkan *gateway* dan fasilitas lainnya," imbuh Agus. ■

(ann.mp) jicannce/br

Ketua DPR RI Solat Ied di Masjid Istiqlal

Ketua DPR RI Ade Komarudin melaksanakan salat Idul Fitri bersama ribuan muslim dan muslimat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (6/7) pagi. Selain Ketua DPR RI hadir juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan anggota Komisi V Rendy M Affandy Lamadjido beserta para pejabat negara lainnya.



Suasana pelaksanaan Shalat Idul Fitri Pimpinan DPR RI bersama ribuan muslim dan muslimat di Masjid Istiqlal

Sekitar jam 7.00, salat Ied pun dimulai dengan H Ahmad Husni Ismail MAg sebagai imam. Setelah selesai salat sunnah muakkadah dua rakaat tersebut, imam besar Masjid Istiqlal Prof Dr H Nasaruddin Umar MA membaca khutbah yang berjudul Mempersiapkan Generasi Qur'ani.

Tepat pukul 07.30 WIB, rangkaian salat Ied yang dihadiri juga sejumlah anggota kabinet, di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Agraria Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan itu berakhir.

Setelah bersilaturahmi sejenak dengan jajaran pengurus Masjid Istiqlal, Ketua beserta Wakil Ketua DPR RI dan rombongan meninggalkan masjid terbesar di Indonesia itu. Jumlah jemaah yang mengikuti shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal diperkirakan mencapai 150 ribu orang.

Usai Solat Ied, Ketua DPR RI selanjutnya menggelar "open house" di kediamannya di Kompleks Widya Chandra. ■

(Eno.mp) Foto: Kromo, drif/br

Agus Hermanto Gelar Open House Idul Fitri 1437H



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Usai menjalankan sholat Idul Fitri 1437 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu, (6/7), Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto beserta keluarga menggelar *open house* dirumah dinas di jalan Denpasar Raya C.3, Komplek Pejabat Negara, Jakarta.

A cara yang digelar dari pukul setengah satu siang sampai sore hari dihadiri sejumlah tamu yang terdiri dari sahabat, keluarga dan handai taulan.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Hermanto pun menyampaikan, "Atas nama keluarga besar Agus Hermanto mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir bathin. Tentunya banyak kesalahan-kesalahan saya dan memohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya,"

Tim Parlemenaria yang turut hadir pada acara *open house* tersebut pun

sempat menanyakan mengenai makna Idul Fitri bagi Agus Hermanto, dijawabnya, bahwa kita harus betul-betul bersyukur, serta meningkatkan keyakinan bahwa Bulan Ramadhan adalah bulan yang diagungkan.

"Dibulan Ramadhan, kita memaknainya untuk bisa mendapatkan rahmat, magfirah dan Insya Allah kita semua mendapatkan lailatul qadar. Kita harus menikmati setiap ramadhan sesuai dengan fitrahnya. Karena bulan yang terbaik maka kita harus melaksanakan hal-hal yang terbaik pula," tegasnya. ■

(arf) fotoarif/ius

Jangan Ada Perploncoan dalam MOS

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengingatkan, jangan sampai kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) yang seharusnya bertujuan untuk Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), malah menjadi arena perploncoan.

“Jangan sampai MOS menjadi arena perploncoan seperti penyiksaan fisik, verbal dan pemakaian busana tertentu yang bersifat jauh dari sekedar untuk mendekatkan antara junior dan senior,” tegas Sutan, dalam pesan singkatnya kepada Parlemenaria, Rabu (13/7).

Untuk itu, tambah politisi F-Gerindra itu, MOS sebenarnya membutuhkan pengawasan yang ketat dari Dinas Pendidikan serta sekolah itu sendiri.

"Seharusnya sekolah lebih kreatif dalam menyusun bentuk acara MOS yang lebih edukatif dan merangsang semangat siswa dalam sekolah," saran politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru.

"Mendikbud sudah mengeluarkan pedoman pelaksanaan MOS, jadi sekolah harus konsisten menjalankan MOS berdasarkan prinsip penguatan karakter anak, bukan perpeloncoan," tegas

Dadang, dalam rilis yang dikirimnya.

Menurut politisi F-Hanura itu, aksi perploncoan itu tidak akan menghasilkan generasi kreatif, dan hanya 'mentradisikan pembalasan' senior-junior yang tidak mendidik.

"Perpeloncoan itu kan bentuk feodal yang diwariskan turun temurun. Dari mulai kultur penjajahan sampai orde baru. Sekarang zaman kan sudah berubah. Harus dicari cara cerdas dengan kegiatan

yang kreatif dan tidak membuat beban tambahan bagi calon siswa," saran Dadang.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu mengingatkan, Dinas Pendidikan harus menindak dengan tegas kepada sekolah yang membiarkan terjadinya aksi perploncoan, termasuk kepada Kepala Sekolahnya. ■

(gf) Foto: Akbar/br

Setjen DPR RI Klarifikasi Pemberitaan Putri Fadli Zon

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany dengan didampingi Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP), Saiful Islam, dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Suratna, menggelar konferensi untuk mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang di media massa terkait keberangkatan putri Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Shafa Sabila Fadli ke New York, Amerika Serikat.

“ Bertempat di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/6), Win, panggilan akrab Winantuningtyas menjelaskan beberapa hal terkait keberangkatan Shafa dalam rangka mengikuti kursus singkat Stagedoor Manor 2016 di Loch Sheldrake, New York, AS, beberapa waktu lalu.

"Komunikasi dimulai dari Pak Fadli Zon kepada Pak Isnu (Kepala Bagian Sekretariat TU Korpolkam), staf langsung yang melekat dengan beliau (Fadli Zon, -RED). Diterjemahkan oleh Pak Isnu dengan menghubungi Pak Saiful," jelas Win.

Win memaparkan, kata 'pendampingan' yang ada di surat faksimili dari Setjen DPR RI yang dikirimkan kepada KBRI Washington DC dan KJRI New York, itu karena berasal dari template surat yang biasa digunakan oleh KSAP kepada KBRI dan KJRI di luar negeri. Dimana template surat itu untuk kepentingan dinas Anggota Dewan.

"Template surat itu untuk kepentingan dinas Anggota Dewan, karena sudah Jumat (10/6) sore, sedangkan putri Pak Fadli Zon berangkat ke AS itu Sabtu (11/6) dini hari, pukul 00.40 WIB. Kemudian dipakailah template surat yang dirasa kurang pas, yakni masih ada kata pendampingan," jelas Win.

Win menegaskan, ketika Anggota Dewan menghadiri konferensi internasional di luar negeri, itu dalam rangka melaksanakan diplomasi parlemen. Sudah lazimnya, setiap Anggota Dewan menghadiri konferensi internasional selalu didampingi pejabat dari KBRI.

"Oleh karena itu, format surat faksimilinya menjadi seperti itu. Ini yang kemudian terburu-buru, template surat yang terpilih adalah yang menggunakan kata pendampingan. Padahal sudah jelas, penyelenggara kursus singkat ini melarang adanya pendampingan. Ini ada kesalahan teknis," imbuh Win.

Sementara itu, Saiful menjelaskan, pihaknya memang memiliki wewenang untuk menangani keseluruhan hubungan

DPR RI dengan parlemen seluruh dunia, termasuk organisasi internasional, dan konferensi internasional. Semua surat yang berhubungan dengan kegiatan Anggota Dewan di luar negeri, ditangani oleh KSAP.

"Selama ini template-nya adalah terkait konferensi. Karena waktu itu sudah Jumat sore, sedangkan putri Pak Fadli Zon berangkat pada hari Sabtu dini hari, sedangkan hari Sabtu kantor sudah libur. Maka saya merespon begitu cepat, dengan tanpa memperhatikan yang sebenarnya tidak ada kata 'pendampingan', tetapi hanya penjemputan," jelas Saiful.

Saiful mengakui, dirinya tidak mengoreksi kata-kata dalam surat itu. Termasuk adanya kata 'pendampingan', sehingga terlewatkan, karena dikejar untuk segera dikirim ke KBRI dan KJRI.

Saiful pun menjelaskan kronologis pengiriman faksimili itu, Ia memastikan, pengiriman berita faksimili terkait dengan keberangkatan Shafa untuk mengikuti kursus singkat Stagedoor Manor 2016 di Loch Sheldrake, New York, AS, bukan atas permintaan Fadli Zon.

"Terkait hal tersebut, Pak Fadli Zon memberi tahu staf Korpolkam untuk melaporkan kedatangan putrinya tersebut kepada pihak KJRI New York. Shafa adalah seorang remaja yang baru saja lulus SMA dan akan melakukan perjalanan seorang diri," jelas Saiful.

Saiful menambahkan, informasi tersebut diterjemahkan oleh staf Korpolkam dengan membuat nota dinas kepada Karo KSAP, yang isinya meminta bantuan penjemputan kepada KJRI New York dengan catatan apabila ada biaya transportasi akan ditanggung pribadi.

"Biro KSAP membuat berita faksimili tentang itinerary dari keberangkatan putri Pak Fadli Zon. Adapun format isi berita



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany didampingi Kepala Biro KSAP dan Pemberitaan Parlemen menggelar konferensi pers terkait keberangkatan putri Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke Amerika.

dibuat berdasarkan template untuk kepentingan dinas Anggota DPR RI dalam rangka menghadiri suatu konferensi internasional yang menyebutkan pendampingan, sehingga memberikan interpretasi yang kurang tepat.

Keberangkatan putri Fadli Zon saat ini sudah terlaksana. KJRI telah memberikan bantuan penjemputan dari Bandara JFK ke Queens, New York City dengan jarak 13 KM dari bandara, bukan ke Stagedoor Manor Camp di Loch Sheldrake yang jaraknya sekitar 200 KM seperti yang dilansir berbagai media.

"Selama mengikuti kegiatan kursus singkat tersebut, putri Fadli Zon telah difasilitasi akomodasi dan lain-lain oleh penyelenggara dan tidak diperkenankan adanya pendampingan," imbuh Saiful.

Sebagaimana diketahui, Fadli juga telah mengganti biaya transportasi penjemputan sebesar Rp 2 juta rupiah kepada Menteri Luar Negeri untuk disampaikan kepada KJRI New York, dengan rincian perkiraan bahan bakar dari bandara ke Queens sebesar 100 USD (Rp 1,330 juta), dan sisanya untuk uang lelah pengemudi.

"Atas kekeliruan surat tersebut, Karo KSAP menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Fadli Zon dan Shafa Sabila Fadli atas ketidaknyamanan dengan pemberitaan yang berkembang," sesal Saiful. ■

Setjen DPR RI Terima Kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menerima kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Utara di gedung Kesetjenan DPR RI, Rabu (29/6). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi terkait pembuatan penegakan peraturan internal.

Rombongan DPRD Sumut dipimpin oleh Murkin Nasution Anggota Badan Musyawarah (Bamus), untuk mengkonsultasikan bagaimana tugas Bamus dalam mengatur jadwal kegiatan rapat. DPRD Sumut ingin belajar pada DPR RI yang selalu konsisten menegakkan aturan internalnya.

"Mereka ingin belajar banyak dari DPR RI ingin tahu lebih detail apa yang sudah dilakukan DPR RI dan bagaimana Bamus bekerja mengatur jadwal kegiatan DPR RI dan bagaimana DPR RI menyusun dan menegakkan aturan internal yang bisa mengikat semua anggota dewan dan mitra kerja." ujar Win sapaan akrab Winantuningtyas Titi.



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menerima kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Win menjelaskan mereka menanyakan tugas Bamus karena masih kebingungan dalam mengatur jadwal. Sering sekali yang sudah ditetapkan tapi suka diubah-ubah semuanya oleh anggota, terkadang juga tidak sinkron dengan jadwal mitra kerjanya. Mereka bertanya bagaimana

menyinkronkan jadwal-jadwal itu supaya efektif.

Menanggapi hal itu Win menjelaskan kuncinya ada di substansi peraturan Tatib, karena sebenarnya posisi Bamus sangat penting, karena tugasnya mempengaruhi kinerja dewan. "Bamus tidak hanya semanta-mata menjadwalkan kegiatan dewan saja tetapi juga bisa meminta progress report, kemudian menetapkan kebijakan

DPR RI jadi tergantung dari keputusan Bamus bagaimana DPR RI ini berkinerja," katanya.

Tetapi Tatib DPRD tidak selalu sama dengan DPR RI tergantung kebutuhannya. Ia memberi contoh, misalnya DPRD reses tiga kali sementara DPR RI lima kali ini diatur dalam Tatib. Jadi apapun yang akan dilakukan diatur dulu tidak bisa semena-mena.

"Saya sampaikan karena pentingnya posisi Bamus maka pimpinannya adalah pimpinan DPR RI dan anggotanya adalah ketua dan sekretaris fraksi, artinya kebijakan penting yang diambil mewakili suara dari partai politik yang di repretasikan oleh fraksi-fraksi," tuturnya. ■

Tidak Ada Karyawan DPR RI Yang Bolos Usai Lebaran

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany memaparkan, pihaknya telah melakukan sidak *door to door* ke setiap ruangan untuk memastikan seluruh pegawainya hadir di hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Idul Fitri. Ia pun melaporkan bahwa dari 1.337 pegawai, hadir sebanyak 942 dan sisanya mengajukan ijin tertulis dan mengajukan cuti tahunan.

“Terkait kehadiran staf, alhamdulillah 100% masuk kantor tidak ada yang membolos. Itu adalah hasil *door to door* (sidak) kami memasuki setiap ruangan dari pagi hingga sore,” ujarnya saat menyampaikan sambutan pada acara Halalbihalal dengan Pimpinan DPR RI dan karyawan di lingkungan Setjen DPR RI, Rabu (13/7).

Mengenai cuti lebaran, lanjut Win,

itu terjadi karena sudah terlanjur saja. Pasalnya surat edaran Menpan-RB baru diterima beberapa hari menjelang hari raya, padahal teman-teman karyawan Setjen sudah pesan tiket satu bulan sebelumnya.

Ia menjelaskan hal itu dikarenakan arahan pimpinan DPR RI agar seluruh pegawainya mengutamakan disiplin kerja, integritas dan menjaga loyalitas kepada anggota dewan. "Ini sesuai

arahan Pimpinan bahwa kami harus disiplin, berintegritas dan menjaga loyalitas kepada anggota dewan karena harus menjaga nama baik dewan," paparnya.

Tak hanya itu, Win juga memaparkan bahwa dirinya ingin sekali pihaknya menyelenggarakan mudik bersama untuk seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk tahun berikutnya. Ia pun meminta dukungan dari Pimpinan DPR RI untuk merealisasikan hal tersebut. "Dalam rangka hari raya Idul Fitri, kami ingin sekali menyelenggarakan mudik bersama untuk ke depan, mohon dukungan Bapak Pimpinan," harapnya.

Hal itu didasari karena tiap tahun selalu ada surat edaran dari Kemenpan-RB yang melarang pegawai menggunakan mobil operasional dalam mudik. Yang diperbolehkan adalah kendaraan yang melekat dengan jabatan.

"Padahal kendaraan yang melekat di jabatan hanya beberapa saja. Nah yang kami ingin, seluruh pegawai bisa gunakan fasilitas mudik bersama ini setidaknya mampu mengurangi kemacetan, karena biasanya menggunakan mobil pribadi," pungkasnya.

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi kedisiplinan karyawan Setjen DPR RI dan optimis kinerja DPR RI akan semakin baik. ■

(b.s.mp) / foto: rini / iwa.



Suasana Halalbihalal Pimpinan dan Karyawan Setjen DPR RI

Militer Indonesia Jangan Jago Kandang

Militer Indonesia didesak agar bekerja optimal menjaga teritorial kedaulatan negara. Teritori yang dimaksud tidak hanya perairan, tapi kapal-kapal penumpang Indonesia juga merupakan teritori yang harus dijaga ketika melintasi perbatasan. "Militer Indonesia jangan hanya jago kandang."

Demikian pernyataan tegas Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilisnya, Kamis (14/7). Pernyataan Bambang ini merupakan kritik atas terulangnya aksi penyanderaan sejumlah WNI oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Mereka disandera saat melintas di perairan Malaysia. Penyanderaan ini merupakan aksi kedua, setelah para sandera yang merupakan ABK Indonesia berhasil dibebaskan pada Mei lalu.

"Dalam kasus ini, integritas bangsa kita sudah diacak-acak. Presiden dan Wapres harus mengawal mereka semua, termasuk kegiatan perekonomian di perairan kita," kata Bambang. Politisi Gerindra itu mengungkapkan, dengan jumlah personel tentara sekitar 500.000 orang, mestinya sudah cukup mengawal teritori termasuk kapal-kapal Indonesia yang melintasi perbatasan dengan negara-negara tetangga.



Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga mengkritik pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berencana menghentikan sementara pengiriman batubara ke Filipina Selatan. "Penghentian pengiriman

tersebut akan berdampak pada perekonomian negara kita. Padahal, saat yang sama kondisi perekonomian kita masih tidak stabil. Bila pengiriman batubara dihentikan, maka akan semakin mengurangi pemasukan devisa negara kita," ucap Bambang lagi. Upaya pembebasan tetap harus dilakukan semaksimal mungkin, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional. Ini dua hal yang berbeda yang sama-sama harus dijaga keamanan dan stabilitasnya. ■

(mb) / foto: ike / iwa.

Pemerintah Lalai Kendalikan Harga Daging

Selama Ramadhan harga komoditas daging di pasaran rata-rata mencapai Rp 120-150 ribu per kg. Harga yang masih jauh dari seruan Presiden Jokowi, yaitu di bawah Rp 80 ribu per kg. Intervensi pasar juga tak mampu menstabilkan harga. Pemerintah pun dinilai lalai menjaga kestabilan harga daging.

Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya ke sejumlah media nasional, Rabu (6/7).



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

"Pemerintah telah lalai dalam menjaga kestabilan harga. Seharusnya lonjakan harga itu tidak akan terjadi kalau saja pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog mengantisipasinya lebih awal. Apalagi kondisi semacam ini terjadi setiap tahun."

Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemerintah tak belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Tahun 2015, masalahnya ada di rantai pasokan yang rawan terdistorsi oleh mafia daging. Kelompok inilah yang selalu menikmati keuntungan dari semrawutnya rantai pasokan daging. "Keuntungan mereka sekitar Rp 8 triliun per tahun. Dengan untung besar itu, mereka bisa leluasa merekayasa harga daging, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen," ungkap Heri.

Lebih jauh mantan Wakil Ketua Komisi VI itu mengungkapkan, sebetulnya rekayasa mafia sudah terendus pada 2015. Modusnya, memainkan harga sapi di peternak dan menjual sapi betina hamil di pasar. Hal

semacam ini mestinya sudah bisa diantisipasi lebih awal. Heri mempertanyakan, ke mana saja anggaran kedaulatan pangan disalurkan selama ini yang jumlah mencapai Rp 70 triliun dalam APBN 2016.

Dengan anggaran sebesar itu, lanjut Heri, rantai pasokan daging bisa lebih berdaulat. Ditambahkannya, untuk menurunkan harga daging perlu aksi sistematis. Dimulai dari aspek produksi, rantai pasokan, hingga penegakan hukum yang kuat. "Dalam konteks ini, koordinasi antara Kemendag, Kementan, Bulog, dan kepolisian sangat diperlukan dalam intensitas yang lebih tinggi."

Dalam jangka pendek, pihak-pihak terkait, memang, tak boleh acuh dengan kenaikan harga daging ini. Politisi dari dapil Jabar IV itu kemudian menawarkan solusi konkrit. Pertama, menjaga stabilitas pasokan dan mengamankan distribusi. Kedua, cegah peternak menjual sapi ke lingkaran mafia. Ketiga, pastikan tidak menjual sapi dalam bentuk gelondongan. Keempat, operasi pasar hendaknya dengan produk daging yang lebih baik, bukan daging dingin yang kualitasnya rendah. ■

(mb), Foto: Arief/br

Setjen DPR RI Kembali Tata Struktur Organisasi

Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menata struktur organisasinya. Ada beberapa pejabat dimutasi ke unit kerja yang baru. Pelantikan pejabat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).

Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Setjen DPR RI dan pengucapan sumpah dari pejabat yang dilantik.

"Ada beberapa jabatan yang kosong, karena struktur organisasi yang baru. Kita lakukan penataan struktur jabatan beberapa kali, dan kita selalu melakukan evaluasi. Ini

juga berdasarkan arahan dari Pimpinan DPR RI dimana pejabat itu harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan cocok di tugas itu," kata Win, panggilan akrab Winantuningtyas, usai acara pelantikan.

Win memastikan, ada beberapa pejabat yang dimutasi atau dipromosikan untuk mengisi

kekosongan jabatan. Namun ada juga jabatan yang fungsinya bertambah.

"Ini juga penyesuaian dengan tuntutan pekerjaan dan penyegaran, supaya yang sudah lama menjabat di unit sebelumnya, dapat menambah wawasan di unit kerja yang baru. Kita mencoba menempatkan pegawai sesuai dengan kapasitasnya, sehingga harapannya kinerjanya akan lebih meningkat," harap Win.

Pejabat yang dilantik yakni Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen yang dijabat oleh Saiful Islam. Berikutnya Helmizar, yang semula menjabat Kepala

Paling Berat Dalam Menjalankan Agama adalah Melaksanakan Amanah

Ustadz Dadang Holiyulloh mengemukakan, dalam menjalankan agama yang paling berat adalah melaksanakan amanah. Amanah menjalankan perintah agama, mumpung masih sehat dan masih kuat kenapa tidak mudik alasannya macet, padahal bertemu dengan orang tua adalah bagian kepentingan kita menjalankan dari amanah Allah.

Hal itu diutarakannya dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan Setjen DPR RI dihadiri Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, para pejabat dan karyawan Setjen DPR RI serta mantan Sekjen serta Pengurus Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) DPR RI,

di Gedung DPR RI, Rabu (13/7).

"Jadi anggota Dewan ini juga amanah dari Allah. Jadi Sekjen DPR RI juga bentuk amanah. Termasuk jadi ustadz juga amanah," ujar KH Dadang penuh semangat.



Ustadz Dadang Holiyulloh Memberikan Tausiyah

Ia melanjutkan bahwa jadi ustad itu berat. Sebelumnya dia bercita-cita ingin jadi polisi namun datang ke Komdak diukur tinggi kurang setengah centi. Lantaran sakit hati tidak jadi polisi lalu pulang ke Sukabumi daftar jadi santri

keluar jadi kiai, alhamdulillah bisa ceramah di kantor polisi.

Mengutip salah satu ayat Al-quran, boleh jadi yang disangka buruk oleh manusia, tetapi baik menurut Allah. "

Karena itu menjadi anggota Dewan, menjadi Sekjen DPR RI ini adalah aturan Allah. Ini amanah, meski tidak mau akhirnya tetap dipaksa oleh Allah," tegasnya.

Ini lanjut Dadang, adalah kehidupan. Ketika seorang menjadi pemimpin menjadi siapapun sesungguhnya sedang memegang amanah terhadap dirinya. Terkadang kita lupa dengan kehidupan

dunia, terlena sudah dikasih waktu ternyata tidak bisa memanfaatkan untuk mempersiapkan masa depan kita. Padahal Allah berfirman, ketika ajal menjemput kita, tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat (memundurkan).

Untuk itu dia meminta jangan tertipu dengan usia muda, karena banyak orang muda yang meninggal dunia, juga jangan tertipu dengan badan sehat karena banyak orang sehat meninggal dunia. Maka manfaatkan amanah pada diri kita ini mumpung masih sehat dan diberi kesempatan oleh Allah.

Amanah selanjutnya dalam halal bihalal adalah bilmal dengan harta benda. Dunia adalah titipan Allah, mobil yang miliaran harganya atau hanya jutaan, sama-sama macet di Brexit. "Semuanya diam, mentang-mentang mobil mahal lalu terbang, nggak ada semuanya sama. Artinya harta benda yang kita miliki, yang menjadi hak Allah berupa kewajiban zakat, infaq dan sodaqoh itu harus dikeluarkan," ia menambahkan. ■

Biro Persidangan I, kini menjabat Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan. Sementara itu, jabatan Kepala Biro Persidangan I kini dijabat oleh Dimiyati Sudja, dan Kepala Biro Persidangan II kini dijabat oleh Yohannes O.I. Tahapari.

Pejabat lain yang turut dilantik antara lain Ambarwati Martini (Kepala Sub Bagian Tata Persuratan, Bagian Tata Persuratan), Gardina Kurniawati (Kepala Sub Bagian TU Pelayanan Kesehatan, Bagian Pelayanan Kesehatan), dan Ulfa Nurfajar (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Bagian TU Inspektorat Utama). ■



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

Kesuksesan UU Pengampunan Pajak di Tangan Pemerintah

Rapat paripurna DPR RI ke-32 masa persidangan V tahun 2015-2016 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, Selasa (28/6). Selanjutnya, sukses atau tidaknya pelaksanaan UU ini ada di tangan pemerintah, Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G. Plate mengungkapkan, untuk menjemput kesuksesan target repatriasi dana tergantung pada tindak lanjut pemerintah.

“Sukses tidak suksesnya *Tax Amnesty* ini tentu perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan dari pemerintah di antaranya melakukan reformasi perpajakan yaitu *tax reform*. Ini sedang dibahas Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP),” ujar Johnny belum lama ini di



Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate

Gedung Nusantara II DPR RI. Dalam rapat-rapat yang terdahulu di DPR RI, pemerintah berulang kali meyakinkan para Anggota Dewan, terkait kebijakan strategis UU Pengampunan Pajak, yang diharapkan membawa masalah untuk sistem perekonomian Indonesia.

“Terkait dengan keyakinan akan keberhasilan *Tax Amnesty* tahun ini, tentu ada perhitungannya, pemerintah yang menyiapkannya, dan sudah berulang-ulang kali pemerintah meyakinkan DPR RI. Di antaranya mereka meyakini bahwa minimum penerimaan untuk penambahan dari *Tax Amnesty* itu sekitar Rp 165 triliun,” ungkap Politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

Johnny juga mengharapkan pemerintah mampu meningkatkan dan meluaskan kegiatan ekonomi yang lebih hebat lagi dari sebelumnya. Menurutnya

intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dapat mendorong penerimaan negara.

“Dengan *Tax Amnesty* ini kita harapkan terjadilah yang disebut sebagai intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan di tahun-tahun berikutnya yang akan mendorong penerimaan negara. Penerimaan negara kita ini dari pajak saja masih sekitar 75 persen dari total penerimaan, jadi kita memang bergantung pada penerimaan pajak cukup besar,” harap Anggota Dewan dari dapil Nusa Tenggara Timur I ini.

Sembilan dari sepuluh fraksi menyetujui RUU Pengampunan Pajak, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan keberatan. Sedangkan Partai Demokrat menyatakan setuju untuk disahkan, dengan catatan seluruh minderheidsnota menjadi bagian dari keputusan rapat paripurna.

Setelah DPR RI mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak kepada Presiden Joko Widodo, maka *Tax Amnesty* bisa direalisasikan per 1 Juli 2016. Semua pemangku kepentingan ekonomi mengharapkan efektivitas penerimaan negara dari pengampunan pajak bisa dijalankan maksimal. ■

(dca.mp) foto:arif/mr

Penanaman Disiplin kepada Murid Harus Ditegaskan

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengingatkan, lingkungan sekolah harus dipahami sebagai ekosistem pendidikan. Jadi, hubungan guru dengan murid adalah hubungan pendidik dengan terdidik, bukan hubungan sesama subjek hukum positif.

Demikian dikatakannya saat menanggapi beberapa kasus guru yang dilaporkan oleh orang tua murid, karena dianggap melakukan kekerasan kepada murid, beberapa waktu lalu. Salah satunya menimpa Sambudi, seorang guru SMP swasta di Sidoarjo, Jawa Timur, yang dilaporkan ke polisi dan diseret ke Pengadilan Negeri Sidoarjo atas dugaan penganiayaan kepada R, muridnya sendiri.

Walaupun kasus ini telah dibawa ke pengadilan, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

“Jadi apapun yang dilakukan oleh guru, selama itu bukan kekerasan yang menyebabkan cacat atau hilang jiwa, harus dipahami sebagai



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

pembangunan pendidikan karakter, bukan kekerasan terhadap anak," tegas Dadang dalam pesan singkatnya kepada Parlemen, Rabu (13/7).

Dadang menegaskan, penanaman disiplin itu tentu bisa dilakukan dengan tegas pada situasi tertentu, misalnya menjewer atau menyuruh anak *push-up*. Menurutnya itu sesuatu hal yang wajar. Namun yang harus menjadi catatan, hal itu hanya bisa dilakukan pada situasi tertentu dimana anak sudah melewati batas-batas yang dapat mengganggu kenyamanan anak yang lain, atau secara langsung merusak

dirinya sendiri.

"Masak anak yang kabur tidak masuk sekolah terus nongkrong sambil merokok mau dibiarkan saja, atau anak merusak fasilitas sekolah, atau menggunakan kata-kata kotor, mau dibiarkan terus. Kan penegakan disiplin harus dilakukan, bahwa sekali-kali keras tidak masalah," tegas Dadang.

Namun politisi F-Hanura itu mengingatkan, tindakan keras itu hanya untuk kondisi siswa yang dinilai sudah kelewatan. Dan itu jangan menjadi kebiasaan guru. Guru pun dituntut harus

mencari cara kreatif untuk membuat anak disiplin dan cerdas.

"Makanya tindakan yang diperbolehkan itu harus dibuat jelas oleh Permendikbud. Penegakan disiplin atau *punishment* yang konstruktif seperti menyuruh anak lari mengelilingi lapangan upacara, *push-up* atau membersihkan halaman atau toilet, kenapa tidak boleh. Kalau kita semua permisif dan membiarkan anak tumbuh dengan membiasakan keonaran, mau seperti apa bangsa ini ke depan," ujar politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■

(sf) Foto: Azka/mr.

Komisi X DPR RI Apresiasi Permendikbud Soal MOS

Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Sri Rahayuningsih mengaku setuju dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru.

Sebagaimana diketahui, Permen ini mengatur soal kegiatan dan atribut yang dilarang selama Masa Orientasi Siswa (MOS) yang bertujuan menciptakan suasana pengenalan lingkungan sekolah lebih kondusif.

"Iya setuju, atas dasar banyaknya korban akibat MOS," demikian katanya dalam rilis yang diterima Parlemen, baru-baru ini. Yayuk berharap, dengan adanya Permen tersebut diharapkan di tahun ajaran baru 2016-2017 ini, tidak ada lagi siswa yang menjadi korban akibat kegiatan MOS.

Menurut politisi F-Nasdem itu, masa bimbingan bagi peserta didik baru tetaplah penting untuk dilakukan. Namun ia memberi catatan, agar pelaksanaannya perlu dibenahi, sehingga tidak mengakibatkan dampak negatif.

Politisi asal dapil Jawa Timur itu berharap, kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih bermanfaat, relevan, dan masuk akal.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Venna Melinda. Ia mendukung kebijakan Mendikbud yang



Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Sri Rahayuningsih

melarang kegiatan MOS. Menurutnya, PLS harus bertujuan memberikan kesan baik, bukan malah mem-bully.

Menurut politisi F-PD itu, jika ingin menyelesaikan masalah yang dari dulu tidak pernah selesai di dalam kegiatan MOS, maka PLS harus bertujuan sebagai sarana mengenalkan lingkungan sekolah dengan cara yang baik kepada para siswa baru.

"PLS juga harus mampu memberi kesan hangat sehingga memotivasi dan memberi semangat para siswa baru untuk memulai proses pembelajaran yang efektif di jenjang pendidikan yang baru. Dengan

demikian, kekerasan yang ada di sekolah juga akan semakin berkurang," kata Venna.

Venna berharap, hal-hal tak bermanfaat dalam kegiatan MOS seperti menghitung nasi dan gula pasir, memberi hukuman yang tidak mendidik, memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan, serta aktivitas yang tidak relevan bagi calon siswa, tidak akan terjadi lagi.

"Selain itu, juga melarang pembuatan atribut seperti tas karung, tas belanja plastik, kaus kaki berwarna-warni, aksesoris di kepala yang tidak wajar, alas kaki yang tidak wajar, papan nama yang rumit, dan atribut tidak relevan lainnya," tambah politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 dibuat untuk mendukung proses belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Permen ini menggantikan Permendikbud No 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru di Sekolah yang dinilai belum optimal mencegah terjadinya perpindahan di lingkungan sekolah. ■

(sf) foto: azka/mr.

Legislator Kritik Menpan-RB Soal Larangan Penggunaan Mobil Dinas

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menilai tak layak seorang pejabat negara sekelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi meminta bawahannya tidak memakai kendaraan dinas untuk mudik pulang kampung. Sementara sang Menteri Yuddy yang meminta bawahannya taat aturan, malah dirinya sendiri menggunakan mobil dinas mudik lebaran.

“Kalau di keluarga kami diajarkan, sebelum tunjuk kepala orang, lihat dulu diri sendiri. Saya sepakat PNS dilarang mudik pakai mobil dinas, tapi kan ironi kalau menterinya yang memberi aturan justru memakai mobil dinas sewaktu mudik. Tidak soal apakah pakai patwal apa tidak, memakai mobil dinas bukan untuk keperluan kedinasan sebaiknya tidak dilakukan,” jelas Arteria saat dihubungi, Selasa (12/7).

Politisi PDIP ini meminta Menteri Yuddy menjadi teladan bagi bawahannya yang ada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apalagi, lanjutnya, seorang pejabat harus menjalankan aturan yang ada sebagai pelaksana regulasi.

"Jadilah figur yang bisa dicontoh, bukan sekadar membuat aturan, apalagi selevel menteri. Apa iya di rumahnya gak ada mobil pribadi, beda dengan PNS, jangan-jangan mobil dinasnya hanya itu yang jadi mobil satu-satunya. Kalau hanya satu, kami sepakat untuk gunakan mobil dinas itu," katanya.

Ia mencontohkan, anggota DPR RI sebagai pejabat negara yang selevel dengan menteri tidak pernah meminta kepada negara untuk mendapatkan fasilitas termasuk menggunakan patwal. Alasannya, dengan menggunakan patwal hanya mengganggu rakyat termasuk membuat jalan semakin macet.

"DPR RI saja yang berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan, hak protokolernya seharusnya selevel menteri. Kami tidak pernah ngotot untuk mau disejajarkan dalam konteks pemberian fasilitas. Saya ke kantor pun kadang bawa mobil sendiri, tak kepikir patwal-patwalan yang justru bikin rakyat marah di jalan," sambungnya.

Alasan itu pula, ia meminta kepada pembantu Presiden Joko Widodo untuk sensitif terhadap kondisi masyarakat

Indonesia saat ini. Di mana masyarakat ditimpa berbagai kesusahan, termasuk musibah dan krisis yang berkepanjangan. Sehingga sebagian rakyat Indonesia untuk makan dan bertahan hidup saja sangat lah susah, mereka harus berjuang untuk sesuap nasi.

"Saya pikir Menpan juga harusnya lebih sensitif, mawas diri, mampu untuk dicontoh. Apalagi dia kan harusnya jadi motor revolusi mental. Apa sih yang sudah kita kerjakan baik di dewan apalagi di kementerian? Apa seimbang tidak dengan banyaknya fasilitas yang rakyat sudah berikan dengan hasil yang sudah kita perbuat untuk rakyat?" tanya Arteria.

Menurutnya, dari kejadian tersebut semua pihak harus ikut merenungkan bahwa republik ini dalam kondisi sulit. Politisi yang dikenal vocal ini mengusulkan agar pejabat negara mengurangi menggunakan fasilitas negara pada keperluan pribadi untuk meringankan beban negara.

"Sudah saatnya mengurangi beban negara, setidaknya menteri yang bersangkutan tidak pakai mobil dinas untuk mudik karena sikap itu akan dicontoh banyak PNS di lingkungan pemerintahan. Bila larangan itu dipatuhi, bisa puluhan ribu mobil dinas akan terselamatkan, minimal kita akan hemat untuk biaya perawatan yang tidak sedikit juga jumlahnya," pungkasnya. ■



Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan

Kapolri Baru Diharapkan Ikut Ciptakan Kerukunan Umat Beragama

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid berharap Kapolri baru, Jendral Tito Karnavian dapat membantu menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlemen, Rabu (13/7).

(as) Foto: Rumi/for

Buka Puasa Bersama sebagai Ajang Silaturahmi Pejabat Setjen DPR RI

Sekretariat Jenderal menggelar buka puasa bersama seluruh Pejabat Eselon I hingga Eselon IV. Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany mengatakan, acara ini sekaligus acara ajang silaturahmi para pejabat. Menurutnya, ini momentum yang baik di bulan Ramadhan ini.

“ Ini dalam rangka silaturahmi memanfaatkan bulan Ramadhan. Kita kan ketahui bahwa silaturahmi itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Muslim, apalagi di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah. Insyallah pahalanya akan dilipatgandakan,” kata Win, panggilan akrab Winantuningtyas, di Masjid Baiturrahman, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6).



Suasana buka puasa bersama Karyawan Setjen DPR RI

dari Ramadhan adalah menjadi pribadi yang semakin bertakwa.

"Kuda pacu akan memacu larinya mendekati garis akhir. Itu juga bisa diibaratkan ketika mendekati akhir Ramadhan, ibadah harus dipacu. Tujuan akhir Ramadhan adalah menjadi pribadi yang semakin bertakwa," kata Ustadz Dadang.

Ia juga mengingatkan, umat Islam yang berpuasa tidak perlu sombong. Menurutnya, sombong muncul karena ilmu, paras seseorang, pangkat, atau kekayaan.

"Begitu meninggal dunia, tidak ada harta dunia yang ikut. Jadi jangan serakah dengan urusan dunia. Sikap sombong itu dilaknat oleh Allah," pesan Ustadz.

Hadir dalam acara ini diantaranya pejabat pimpinan madya, pejabat pimpinan pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat fungsional tertentu. Acara berlangsung dengan suasana keakraban dan kehangatan. Usai buka puasa bersama, dilanjutkan dengan shalat Maghrib berjamaah. ■

Win menambahkan, silaturahmi ini juga sebagai pelaksanaan nilai-nilai dasar kinerja Setjen DPR RI dalam rangka reformasi birokrasi, yakni religius, akuntabel, profesional dan integritas (RAPI).

"Jadi ini bukan sekedar komitmen saja, tapi sudah harus dilaksanakan. Sehingga kewajiban kita dalam menetapkan nilai dasar RAPI, ya harus dilaksanakan. Salah satunya yang utama ada religius," tambah Win.

Oleh karena itu, jelang Ramadhan kali ini, Win membuat edaran kepada seluruh

pegawai Setjen DPR RI, berupa stiker yang ditempel di gedung Kompleks Parlemen, agar melaksanakan ibadah tepat waktu. Walaupun pekerjaan cukup padat, diharapkan shalat juga disegerakan.

"Kalau kita bekerja dengan mendasarkan nilai-nilai ibadah, Islami, kita lebih mantap menghadapi tugas. Kita juga akan terjaga dari banyak godaan dan cobaan," harap Win.

Sebelum buka puasa bersama, Ustadz Dadang Holiyullah membawakan tausiyahnya. Ia menekankan, tujuan akhir

“ Kami yakin Kapolri baru, Jenderal Tito mempunyai pemahaman yang sangat dalam terhadap sejarah dan karakter setiap agama yang ada di Indonesia. Sehingga dalam turut serta membangun kerukunan umat beragama, Polri melaksanakannya dengan penuh empati, adil, proporsional, dan profesional, tentu dalam naungan empat pilar berbangsa dan bernegara Indonesia,” ungkap Sodik.

Selain itu, lanjut politisi Fraksi Partai Gerinda ini, khusus dalam penanganan terorisme seperti kelompok Santoso serta yang lainnya, ia berharap dibawah kepemimpinan Jenderal Tito, Polri dapat menangannya secara cepat dan tuntas.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjabid

Tidak lagi terkesan sebagai media pelatihan dan uji coba persenjataan, apalagi proyek kerja kepolisian yang berlarut-larut. Termasuk juga tidak membangun generalisasi stigma buruk

terhadap lembaga pendidikan seperti pesantren.

"Dengan begitu saya berharap semoga dibawah kepemimpinan Kapolri baru, yang muda, berprestasi, bersih dan profesional ini, Polri makin terasa kehadirannya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Tentunya diawali dengan memberikan contoh dan keteladanan serta kepatuhan terhadap hukum, komitmen, kesetiaan dan profesional. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja untuk Pak Tito," pungkasnya. ■

(g) Foto: Krena/mr.

(Ayo), Foto: Jakubr

DPR RI Hadiri Peluncuran World e-Parliament Report 2016

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Tantowi Yahya dan Anggota BKSAP Sarwobudi Wiryanti Sukamdani menghadiri konferensi World e-Parliament Conference 2016 yang diselenggarakan pada 28-30 Juni 2016 di Valparaiso, Chile.

Dalam konferensi tersebut, Tantowi Yahya (F-Golkar) menyampaikan, digitalisasi telah mengubah banyak pekerjaan di parlemen dan Indonesia saat ini telah terintegrasi secara Information and Communication Technologies (ICT). "Yakni sebanyak 226 juta jiwa dari 250 juta penduduk adalah pengguna gadget dan lebih dari 80 juta jiwa adalah pengguna aktif media sosial," ujar Tantowi.

Meksipun begitu, Tantowi menjelaskan bahwa masyarakat lebih banyak menerima informasi soal parlemen melalui televisi. "Namun masyarakat lebih banyak menerima informasi tentang kegiatan dan hasil pekerjaan parlemen melalui pemberitaan televisi dan informasi antar anggota parlemen dengan konstituenya yang masih didominasi oleh email dan aplikasi Whatsapp," sambungnya.

Selain itu, Tantowi juga menyampaikan bahwa Indonesia sejak tahun 2008 telah mengesahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "UU Keterbukaan Informasi Publik guna menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi atas kegiatan-kegiatan yang didanai oleh anggaran negara, kecuali informasi yang masuk dalam kategori keamanan militer," papar Tantowi.

"Pada saat yang sama, UU Informasi dan Transaksi Elektronik menuntut masyarakat untuk menggunakan ICT secara bertanggung jawab dengan konsekuensi tuntutan penjara terhadap oknum penyalahgunaan ICT,"



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Tantowi Yahya dan Anggota BKSAP Sarwobudi Wiryanti Sukamdani

sambungannya.

Saat konferensi berlangsung, Sarwobudi Wiryanti Sukamdani (F-PDIP) juga menyampaikan tuntutan kemampuan parlemen dalam pembuatan legislasi yang memenuhi kebutuhan ICT di masa mendatang. "Saat ini tuntutan parlemen dalam tugas legislasi untuk memenuhi kebutuhan ICT di masa mendatang, contohnya kasus transportasi online Uber yang hingga kini belum ada UU yang dapat melindungi perusahaan, pengemudi serta masyarakat pengguna (customer)," papar Sarwobudi.

Sebagaimana diketahui, World e-Parliament Conference pertama kali diselenggarakan tahun 2007 yang diselenggarakan tiap dua tahun sekali. Dalam pelaksanaannya, World e-Parliament Conference 2016 dihadiri sekitar 200 peserta dari 60 negara anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) yang terdiri dari anggota parlemen, staf parlemen, pakar dan praktisi IT, LSM serta organisasi-organisasi pengawas parlemen.

Implementasi ICT di parlemen merupakan tuntutan jaman yang saat ini sudah tidak dapat dihindari lagi guna membentuk parlemen sebagai lembaga

demokrasi yang kuat dan memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat yang tertinggal dalam proses demokrasi.

Tujuan utama pelaksanaan World e-Parliament Conference 2016 adalah peluncuran World e-Parliament Report 2016 dan membahas temuan-temuan penting dari laporan tersebut dari sisi kebijakan maupun sisi teknis. Selama Konferensi, peserta diarahkan saling bertukar

pengalaman tentang bagaimana ICT dapat meningkatkan keterwakilan dalam pembuatan UU dan pengawasan (law-making and oversight), serta dapat mendorong parlemen untuk meningkatkan keterbukaan (openness), kemudahan akses masuk (accessibility), pertanggungjawaban (accountability) dan efektifitas (effectiveness).

Selama konferensi, masing-masing peserta diharapkan juga berpartisipasi aktif melalui penggunaan media sosial (twitter, facebook, instagram), aplikasi innovation board, livestreaming, dan online direct voting. Pada akhir konferensi, forum menghasilkan rekomendasi Strategic Planning untuk dua tahun mendatang.

Bersamaan dengan konferensi tersebut, juga diselenggarakan The 1st Global Legislative Hackathon 2016 yang merupakan pertemuan pertama dari para hacker dalam rangka mengembangkan solusi inovatif atau visualisasi data menggunakan open data legislasi yang tersedia dan mengembangkan lebih jauh open source tool yang ada sekarang. Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan ICT di parlemen. ■

(hs.mpi) foto: dok.BKSAP/Pr

DPR RI Harapkan Tito Karnavian Amanah Jabat Kapolri

Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir mengucapkan selamat kepada Jenderal Tito Karnavian dengan tanggungjawab dan jabatan serta amanah barunya. Adies Kadir berharap agar Jenderal Tito Karnavian mampu menjalankan tugas barunya dengan baik.

Seper ti diberitakan, hari Kamis (14/7) jabatan Kapolri secara resmi diserahkan dari Jenderal Badrodin Haiti ke Jenderal Tito Karnavian. Sedangkan sertijab ditandai dengan penyerahan tongkat komando di PTIK, Jakarta Selatan.

Menurut Adies, Jenderal Tito Karnavian mampu memimpin lembaga kepolisian itu. Hal itu ditandai dengan prestasi dan rekam jejak Tito selama ini sangat baik dan penuh integritas.

Karena itu, pintanya, Tito segera merangkul sejumlah kalangan di internal kepolisian, khususnya pada para seniorinya. Dengan begitu, kepemimpinannya ke depan dapat berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan di hadapan di Komisi III DPR RI lalu saat melakukan fit and proper test.

Selain itu, politisi Golkar itu meminta agar segera melakukan reformasi di internal institusi kepolisian. Jika itu dijalankan dengan baik oleh Tito, maka sempurna lah prestasi dan kecerdasan jenderal itu.

"Tito Karnavian salah satu anggota Polri yang berprestasi dan berdedikasi tinggi. Kita di Komisi III (DPR RI) mengakui prestasi beliau sangat baik. Kami mengharap kan dengan posisi beliau melewati seniorinya, bisa merangkul internal polri. Dalam melakukan reformasi di internal polri dengan baik, kemudian dapat memberi contoh anggota polisi yang baik," terang Adies di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara II Gedung DPR

RI, Rabu (13/7).

"Pak Tito dapat melakukan tugas-tugasnya ke depan, kita yakin dengan itu. Yang pasti sangat besar harapan masyarakat di pundak beliau. Dan kami berharap beliau dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti harapan Presiden Jokowi. Kami dan kawan-kawan Komisi III DPR RI mengucapkan selamat kepada Pak Tito, selamat menjalan tugas dan amanahnya itu pak Jenderal," lanjutnya.

Adies mengungkapkan, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Rabu (13/7) banyak tugas besar yang menanti Tito Karnavian.

Di antaranya, memberantas p a h a m radikalisme, narkoba dan m a k i n

maraknya aksi korupsi di Indonesia termasuk di lembaga kepolisian.

Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya itu meminta pada Tito untuk mawas diri dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di hadapannya. Atau Tito menguatkan ikat pinggang untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya mampu menjalankan tugasnya hingga di akhir masa jabatannya.

"Kami bersyukur, Jenderal Tito yang telah dilantik dan beliau harus mawas diri. Menurut kami, banyak tugas pak Tito ke depannya yang harus dituntaskan. Semua makin berat ke depannya. Apalagi terkait terorisme dan kasus narkoba.

Belum lagi kasus korupsi makin menjadi-jadi. Oleh karena itu, kami berharap beliau kuat menghadapi ujian-ujian berat itu hingga akhir masa jabatannya," terang nya. ■



Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir

Mudik, Kekayaan Khas Budaya Islam di Indonesia

Budaya mudik merupakan salah satu kekuatan dan kekayaan khas budaya Islam di Indonesia. Selain itu, budaya mudik yang menyita energi ini akan lebih bermanfaat dan bermakna jika diisi dengan silaturahmi dan adanya dampak ekonomi secara langsung untuk warga sekitar.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid

“Silaturahmi ini dapat memperkuat dan menyambungkan hubungan antar sesama saudara dan antar sesama warga kampung atau desa. Hal ini untuk menjaga dan melestarikan tradisi dan nilai kebajikan agama dan kebajikan lokal yg mungkin sempat tergerus oleh budaya modern di perantauan” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid dalam keterangan persnya, Jumat (1/7).

Ia menghimbau, hasil-hasil kerja dari perantauan untuk dibelanjakan di kampung halaman. Hal itu dapat memberikan pemberdayaan ekonomi kepada saudara di

kampung dan bukan sebaliknya membawa SDM lemah kompetensi ke perkotaan.

Selain itu, lanjut Sodik, mudik harus membawa pencerahan dan edukasi nilai dan budaya profesionalisme perkotaan kepada penduduk kampung halaman dan bukan sebaliknya hanya membawa budaya konsumerisme.

Ditambahkannya, setiap pemudik juga harus memiliki jiwa negarawan, sehingga perlu mensosialisasikan pengokohan empat pilar berbangsa dan bernegara khususnya kesatuan NKRI. Pemudik harus memperkuat hubungan kultural antara desa dan kota-kota, hubungan kultural antar pulau yang dimediasi oleh komunitas pemudik.

Politisi F-Gerindra ini berharap, fungsi mudik yang begitu strategis, maka pemerintah harus memberikan pelayanan fasilitas dan perlindungan keamanan maksimum dari sejak berangkat sampai kembali ke rumah masing-masing. ■

(ikmp) foto: jaksa/mr.

Komisi IX DPR RI Desak Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu Lakukan Penegakan Hukum

Komisi IX DPR RI dengan tegas mendesak Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Vaksin Palsu untuk mengintensifkan kinerja dan melakukan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan peredaran vaksin palsu di Indonesia serta memberikan laporan secara tertulis kepada Komisi IX DPR RI.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Plt Kepala Badan POM, Kepala Bareskrim Polri, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Vaksin Palsu, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Direktur Biofarma, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis malam (14/7).

Komisi IX juga Badan POM RI untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia dan mendorong



Pimpinan Komisi IX DPR RI

Kemenkes untuk mengkaji usulan dari IDAI agar melakukan pemeriksaan antibodi anak yang terduga menerima vaksin palsu.

Dalam Raker tersebut juga terungkap 14 nama rumah sakit penerima vaksin palsu yang sebagian

besar berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat selain itu terdapat juga 6 Bidan dan klinik yang menerima vaksin palsu.

Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes untuk

berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan limbah rumah sakit secara benar dan aman demi menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. ■

(rnm) foto: jayadi/ru.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS MENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 PREDIKAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III

Jakarta, 29/6/2016



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany Menerima Penghargaan LHP BPK 2015

Setjen DPR RI Terima LHP BPK 2015, WTP ke 8 Kali.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2015. Ia mengatakan bahwa ini adalah ke delapan kalinya Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hal itu disampaikan usai menghadiri penyerahan LHP di Auditorium BPK RI, Jakarta pada Rabu, (29/6)

“ Alhamdulillah ini adalah ke delapan kalinya Setjen DPR RI mendapatkan penghargaan WTP. Ini adalah ukuran dalam laporan keuangan negara yang dianggap sudah bagus dan sesuai standar. Alhamdulillah kita dapat penghargaan tersebut,” ujar Win, sapaan akrabnya. Ia pun juga menginginkan agar predikat tersebut bisa dipertahankan di tahun berikutnya. “Tentu tidak mudah mempertahankannya. Jadi nanti harus diteruskan,” tegasnya.

Win juga menjelaskan bahwa

sebelum proses pemeriksaan oleh BPK, semua pejabat pengelola keuangan di Setjen DPR RI berkoordinasi dengan Inspektorat Utama (Irtama) guna dilakukan pemeriksaan internal. “Sebelum BPK melakukan pemeriksaan, semua pejabat pengelola keuangan berkoordinasi dengan irtama. Jadi kita dikoreksi terlebih dahulu oleh pemeriksa internal, jadi ada tahapan pemeriksaan,” terangnya.

Setjen DPR RI juga telah berupaya untuk mendorong pejabat pengelola

anggaran untuk lebih serius membuat laporan sesuai standar. “Dari situ kami sebetulnya juga mendorong pejabat pengelola anggaran untuk serius dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan. Alhamdulillah berkat tahapan tersebut, kami mendapatkan WTP,” paparnya.

Win juga menegaskan bahwa Setjen DPR RI dalam proses pelaporan anggaran menggunakan sistem yang terintegrasi antar pengelola keuangan, sehingga bisa dilakukan saling kontrol dan mudah dimonitor oleh inspektorat. Sehingga ke depan ia berharap akan lebih tertib dalam laporan keuangannya.

“Ke depan kita upayakan lebih tertib, apalagi sekarang kita membangun sistem semar, yakni sistem yang terintegrasi antar pengelola keuangan. Ada sistem perencanaannya (sincan), sistem pelaksanaan anggarannya. Nah jadi antar unit kerja jadi lebih mudah dimonitor oleh inspektorat, bisa saling kontrol dan bisa sesuai standar akuntansi pemerintah,” pungkasnya. ■

(b.w.n.p.) foto: Jakarta

JENDELA PARLEMEN



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Ketua MPR RI beserta Wakilnya melayani langsung penjualan daging sapi murah untuk masyarakat dan karyawan di lingkungan Komplek Parlemen, Jum'at (1/7) Foto: Kresno/jk



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meninjau kesiapan PT KAI menghadapi arus balik di Stasiun Poncol, Semarang, Jum'at (9/7). Foto: Anne/Jk



Prosesi pelantikan pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin langsung oleh Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasany, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (13/7) Foto: Runi



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

